

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/332094618>

# Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Article · December 2018

CITATIONS

11

READS

1,829

5 authors, including:



**Ahmad Mustanir**

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

171 PUBLICATIONS 538 CITATIONS

SEE PROFILE



**Kamaruddin Sellang**

36 PUBLICATIONS 46 CITATIONS

SEE PROFILE



**Akhwan Ali**

Universitas Muhammadiyah Sidrap

11 PUBLICATIONS 85 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



lecturer [View project](#)



Magang Mahasiswa [View project](#)

**PERANAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA  
TONRONGNGE KECAMATAN BARANTI  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Oleh

**Ahmad Mustanir<sup>1)</sup>, Kamaruddin Sellang<sup>2)</sup>, Akhwan Ali<sup>3)</sup>,  
Madaling<sup>4)</sup>, Mutmainna<sup>5)</sup>**

<sup>1)</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Rappang

<sup>2) 3) 4)</sup> Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah  
Rappang

<sup>5)</sup> Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah  
Rappang

E-mail: ahmadmustanir74@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan aparaturn pemerintah desa dan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aparaturn pemerintah desa dan partisipasi masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuesioner, dan Data Kepustakaan. Data diolah melalui tabel frekuensi dan persentase. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dan sampel yaitu masyarakat yang dianggap banyak mengetahui terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi yaitu 94 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan aparaturn pemerintah desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori baik dengan persentase 76%, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aparaturn pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori baik dengan persentase 64%, dan persentase secara keseluruhan yaitu 76%

Kata Kunci : *Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Peranan Aparatur*

### **Abstract**

*The purpose of the study was to determine the role of village government officials and community participation and the factors that influence the role of village government officials and community participation in the Development Planning Consultation in Tonrongnge Village, Baranti District, Sidenreng Rappang District. Data collection techniques carried out in this study were Observation, Questionnaire, and Library Data. Data is processed through frequency and percentage tables. The population of this study was all communities in Tonrongnge Village, Baranti Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency, and the samples were people who were considered to know a lot about the problems faced and it was expected that the respondents chosen represented a population of 94 people. The results showed that the role of village government officials in the Development Planning Consultation in Tonrongnge Village, Baranti Subdistrict, Sidenreng Rappang District was in the good category with a percentage of 76%, community participation in the Development Planning Meeting was in the very good category with a percentage of 81%, and factors influencing the role of village government apparatus and community participation in the Development Planning Deliberation is in the good category with a percentage of 64%, and the overall percentage is 76%.*

**Keywords:** *Community Participation, Deliberation of Development Planning, Role of Apparatus.*

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Disatu pihak, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka bagi daerah. Namun demikian, disisi yang lain telah menghalang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan dan sumberdaya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan.

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan *social* ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah serta dalam era globalisasi, pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah, memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat

serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilaksanakan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam pencapaian tujuan.

Pemerintah desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Peranan aparatur pemerintah desa sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat. Desa sebagai organisasi yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aparatur pemerintahan dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas hampir 80% berada di pedesaan, maka sudah sepatutnya usaha pembangunan masyarakat desa perlu mendapat prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi Otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu program daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan

suatu strategi melalui berbagai kegiatan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana urusan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan *social* kemasyarakatan desa secara otonom. ADD merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Niat dan keinginan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat (A. D. Mustanir 2016).

Dengan adanya dukungan dana yang digulirkan dari pusat tersebut, tidak akan ada artinya tanpa harus didukung dengan peran dan fungsi kepala desa beserta unsur-unsur terkait yang ada dalam sistem pemerintahan desa. Kepala Desa selaku pemimpin diharapkan untuk mengarahkan atau memberikan motivasi terhadap aparat pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Oleh karena itu agar tujuan pembangunan dapat terwujud maka peran serta dan kerja sama dari seluruh masyarakat yang ada sangat diperlukan sekali, karena salah satu faktor yang menentukan

dalam terlaksananya suatu pembangunan adalah faktor manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi. Melalui pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat ini akan dapat dilaksanakan pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mekanisme perencanaan tersebut dimulai dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, yang selanjutnya di tingkat regional dan nasional. Dalam setiap proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang diharapkan sesungguhnya adalah adanya peranan aparatur pemerintah dan partisipasi masyarakat (Mustanir, Ahmad; Abadi 2016) (A. Mustanir and Razak 2017).

Namun pada hakikatnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa/kelurahan hanya melibatkan pemangku kepentingan, sehingga tidak terlihat lagi keterlibatan masyarakat.

Dari hasil observasi yang diamati, ditinjau dari segi bentuk peranan aparatur pemerintah desa yakni tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembangunan aparatur pemerintah desa di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti belum optimal karena aparatur pemerintah belum menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak tergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan banyak dari masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan karena adanya faktor kesibukan pekerjaan sehingga pihak Desa hanya melibatkan beberapa pihak yang dianggap mewakili masyarakat saja. Selain itu untuk keterlibatan masyarakat memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan dana tidak ada, masyarakat hanya mengandalkan dana

dari pemerintah saja dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan pembangunan yang dihasilkan terkadang masyarakat belum berpartisipasi dengan baik untuk memelihara pembangunan tersebut. padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Desa Tonrongnge merupakan salah satu bentuk pemerintahan desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara umum peranan aparatur desa dan partisipasi masyarakat masih terlihat kurang baik, padahal pelaksanaan musrenbang masyarakat menjadi penentu bagi keberhasilannya. Tantangan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya sangat tergantung pada upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat yang saat ini masih kurang.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Aparatur Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (A. Mustanir and Yasin 2018) (Mustanir, Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid 2017).

### **2.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Menurut (A. Mustanir, Yasin, et al. 2018) terdapat beberapa pengertian dasar mengenai partisipasi masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut

- 1) Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan individu, kelompok atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah



masyarakat, untuk berminat dan bergerak di penyelenggaraan penataan ruang (Barisan, Ramadhan, and Mustanir 2017) (A. Mustanir and Rusdi 2019).

- 2) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai obyek dan subjek pembangunan, keterlibatan dalam tahap pembangunan dimulai sejak tahap perencanaan sampai pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya (A. Mustanir 2016) (A. Mustanir, Justira, et al. 2018).

Menurut Conyers dalam (A. Mustanir and Lubis 2017), mengemukakan bahwa ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting yaitu :

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat;
- 2) Masyarakat akan lebih percaya proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanannya;

Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat di libatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri (A. Mustanir and Jaya 2016)

### 2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (top down planning)(A. Mustanir 2018b) (A. Mustanir 2017).

Musrenbang diselenggarakan untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dilaksanakan di Desa atau dibahas

kembali ke tingkat Kecamatan (Irwan et al. 2019) (A. Mustanir 2018a) (Latif et al. 2019).

Pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, hingga dibawa ke tingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat perencanaan pembangunan. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas, dan masih terbatas pada seremonial dan acara rutin belaka. Peran lembaga daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam forum Musrenbang mutlak diperlukan sebagai salah satu usaha menuju pemerintahan daerah yang lebih baik (Akhmad, Mustanir, and Ramadhan 2018) (Damis Dadda et al. 2019)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni sebuah penelitian yang berusaha memberikan gambaran atau uraian (Sugiyono, 2014: 6). Jadi penelitian ini menggambarkan peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam musrenbang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dilakukan adalah survei dimana kegiatan penelitian menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dilapangan. Selain itu teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana wujud/bentuk peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dan untuk menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta menganalisis bagaimana akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Variabel penelitian diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan memperhatikan indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan/pernyataan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data quisioner diatas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Rekapitulasi Indikator Peranan Aparatur Pemerintah Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

No.	Pertanyaan	Persentase	Kategori
1.	Tanggapan Responden Terkait Peranan Pemerintah Desa Tonrongnge	66%	Baik
2.	Tanggapan Responden Mengenai Peranan Aparatur Pemerintah yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di Desa Tonrongnge	74%	Baik
3.	Tanggapan Responden Mengenai Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Staf Dalam Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan di Desa Tonrongnge.	78%	Baik
4.	Tanggapan Resonden Mengenai Peranan Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tonrongnge	80%	Baik
5.	Tanggapan Responden Mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam Memberikan Bimbingan Kepada Masyarakat di Desa Tonrongnge.	70%	Baik

No.	Pertanyaan	Persentase	Kategori
6.	Tanggapan Responden Terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tonrongnge.	78%	Baik
7.	Tanggapan Responden Mengenai Upaya yang di Lakukan Pemerintah Desa untuk Mempertemukan Aspirasi Masyarakat dan Usulan Program dari Pemerintah di Desa Tonrongnge.	75%	Baik
8.	Tanggapan Responden Mengenai Upaya yang di Lakukan Pemerintah Desa dalam Memaksimalkan Pembangunan di Desa Tonrongnge.	76%	Baik
9.	Tanggapan Responden Mengenai Peranan Aparatur Pemerintah Desa dalam Menangani Issu dan Permasalahan Prioritas Pembangunan di Desa Tonrongnge.	86%	Baik
Rata-rata		76%	Baik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rekapitulasi indikator peranan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Tonrongnge, rata-ratanya adalah 76% berada pada kategori baik.

**Tabel 2. Rekapitulasi Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

No.	Pertanyaan	Persentase	Kategori
1.	Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Warga Masyarakat dalam Menyampaikan Aspirasi, Gagasan, Kebutuhan dan Tuntunan terhadap Komunitas Maupun Kebijakan Pemerintah di Desa Tonrongnge.	81%	Sangat Baik
2.	Tanggapan Responden Mengenai Warga	79%	Baik

No.	Pertanyaan	Persentase	Kategori
	Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Berpartisipasi di Desa Tonrongnge.		
3.	Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Pemerintah Desa dan Kemampuan Warga dalam Melakukan Penilaian Terhadap Pembangunan di Desa Tonrongnge.	82%	Sangat Baik
4.	Tanggapan Responden Mengenai Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Mencapai Keberhasilan Pembangunan di Desa Tonrongnge.	86%	Sangat Baik
5.	Tanggapan Responden Mengenai Upaya Warga Masyarakat Menyelesaikan Masalah-Masalah Pembangunan Di Desa Tonrongnge.	82%	Sangat Baik
6.	Tanggapan Responden Mengenai Hasil Keputusan yang Sudah di Setujui oleh Aparat dan Pemangku Kepentingan di Desa Tonrongnge.	76%	Baik
Rata-rata		81%	Sangat Baik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rekapitulasi indikator partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Tonrongnge, rata-ratanya adalah 81% berada pada kategori baik.

**Tabel 3. Rekapitulasi Indikator Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dan Peranan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

No.	Pertanyaan	Persentase	Kategori
1.	Tanggapan Responden Mengenai Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Satuan Kelompok Dalam Suatu Kegiatan	63%	Baik

No.	Pertanyaan	Persentase	Kategori
	Tertentu di Desa Tonrongnge.		
2.	Tanggapan Responden Mengenai Peranan Aparatur Pemerintah Desa yang Melibatkan Masyarakat dalam Suatu Kegiatan Tertentu di Desa Tonrongnge.	65%	Baik
Rata-rata		64%	Baik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rekapitulasi indikator Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Tonrongnge, rata-ratanya adalah 64% berada pada kategori baik.

Adapun total keseluruhan nilai dari variabel ini adalah sebesar 5.053 untuk mengetahui jumlah persentasenya atau skor idealnya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot Tertinggi} \times \text{Jumlah Per tan yaan} \times \text{Jumlah Re sponden}} \\
 &= \frac{5.654}{4 \times 18 \times 104} = \frac{5.654}{7.488} \\
 &= 0,76 \text{ atau } 76\%
 \end{aligned}$$

Jadi, nilai dari peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Tonrongnge adalah 76% dari 100% hasil yang diharapkan, dimana ini tergolong dalam kategori baik.

## 5. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peranan peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Tonrongnge berada pada kategori baik.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis kuisioner menunjukkan bahwa

- 1) Peranan Aparatur Pemerintah Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sangat penting karena berpengaruh untuk dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam pelaksanaan setiap kegiatan sangat baik, karena masyarakat ikut aktif dalam setiap kegiatan demi mencapai keberhasilan pembangunan Desa, dan
- 3) Faktor yang berpengaruh yaitu Faktor Internal kelompok masyarakat, jenis keterlibatan dalam kegiatan pembangunan desa sangat berpengaruh, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik sedangkan Eksternal keterlibatan tokoh masyarakat yang memberikan motivasi dan pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Akhmad, Israwaty, Ahmad Mustanir, and Muhammad Rohady Ramadhan. 2018. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang." In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*. Jilid 2. *Sosial Politik Dan Ekonomi*, 89–103.  
<http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>.
- Barisan, Barisan, Muh Rohady Ramadhan, and Ahmad Mustanir. 2017. "Sidenreng Rappang Versus Masyarakat Ekonomi Asean." In *The 2nd Journal of Government and Politics International Conference*, II:258 – 262. Yogyakarta: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<http://jksg.umsida.ac.id/proceeding-2nd-jgp/>.

Conyers, D. (2001). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gadjah Mada University Press: Jakarta.

Damis Dadda, Andi, Ahmad Mustanir, Andi Nilwana, and Jamaluddin Ahmad. 2019. "Pengaruh Kepemimpinan Lurah Perempuan Terhadap Stabilitas Kamtibmas Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang." In *Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 378–83. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>.

Irwan, Irwan, Adam Latif, Sofyan Sofyan, Ahmad Mustanir, and Fatimah Fatimah. 2019. "Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis* 5 (1): 32–43. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1900>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2003). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang *Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*

Kunarjo. (1993). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Latif, Adam, Irwan Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, and Muh Sutrisno. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis* 5 (1): 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>.



- Mustanir, Ahmad; Abadi, Partisan. 2016. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." *Jurnal Politik Profetik* 5 (2): 247–61. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986>.
- Mustanir, Ahmad; Barisan, Barisan; Hamid, Hariyanti. 2017. "Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method Of Development Planning." In *Indonesian Association for Public Administration (IAPA) International Conference Towards Open Government: Finding the Whole Government Approach*, edited by Philipus Keban Nanang Haryono, Agie Nugroho Soegiono, Putu Aditya Ferdy Ariawantara, 77–84. Surabaya: The Faculty Of Social And Political Science Universitas Airlangga. <http://conference.unair.ac.id/index.php/IAPA/iapa2017>.
- Mustanir, Ahmad; Darmiah. 2016. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." *Jurnal Politik Profetik* 04 (2): 225–38. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>.
- Mustanir, Ahmad. 2016. "Perencanaan Mewujudkan Kehidupan Pemerintahan Dan Sosial Yang Islami Di Desa Tonrong Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *Prosiding Seminar Nasional, Reformasi Dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan*, 289 – 307. [https://www.researchgate.net/publication/330101808\\_Perencanaan\\_Mewujudkan\\_Kehidupan\\_Pemerintahan\\_dan\\_Sosial\\_Yang\\_Islami\\_di\\_Desa\\_Tonrong\\_Rijang\\_Kabupaten\\_Sidenreng\\_Rappang](https://www.researchgate.net/publication/330101808_Perencanaan_Mewujudkan_Kehidupan_Pemerintahan_dan_Sosial_Yang_Islami_di_Desa_Tonrong_Rijang_Kabupaten_Sidenreng_Rappang).
- . 2017. "Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif." Rappang. [https://www.researchgate.net/publication/331065123\\_Pemberdayaan\\_Badan\\_Usaha\\_Milik\\_Desa\\_Melalui\\_Kelompok\\_Ekonomi\\_Kewirausahaan\\_Secara\\_Partisipatif](https://www.researchgate.net/publication/331065123_Pemberdayaan_Badan_Usaha_Milik_Desa_Melalui_Kelompok_Ekonomi_Kewirausahaan_Secara_Partisipatif).

- . 2018a. “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Dan Potensi Desa Sereang.” Rappang.  
[https://www.researchgate.net/publication/331064206\\_Pemanfaatan\\_Teknologi\\_Informasi\\_Dalam\\_Optimalisasi\\_Pelayanan\\_Publik\\_dan\\_Potensi\\_Desa\\_Sereang](https://www.researchgate.net/publication/331064206_Pemanfaatan_Teknologi_Informasi_Dalam_Optimalisasi_Pelayanan_Publik_dan_Potensi_Desa_Sereang).
- . 2018b. “Pemberdayaan Perempuan Anggota Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemanfaatan Lahan Kebun Bibit Desa.” Rappang.  
[https://www.researchgate.net/publication/331071158\\_Pemberdayaan\\_Perempuan\\_Anggota\\_Badan\\_Usaha\\_Milik\\_Desa\\_dengan\\_Pemanfaatan\\_Lahan\\_Kebun\\_Bibit\\_Desa](https://www.researchgate.net/publication/331071158_Pemberdayaan_Perempuan_Anggota_Badan_Usaha_Milik_Desa_dengan_Pemanfaatan_Lahan_Kebun_Bibit_Desa).
- Mustanir, Ahmad, and Irfan Jaya. 2016. “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH TOWANI TOLOTANG DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.” *Jurnal Politik Profetik* 04 (1): 84–97. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2741#>.
- Mustanir, Ahmad, Nur Justira, Kamaruddin Sellang, and Andi Ilham Muchtar. 2018. “Democratic Model On Decision-Making At Deliberations Of Development Planning.” *International Conference on Government Leadership and Social Science (ICOGLOSS). Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement*, 110 – 115.  
[https://www.researchgate.net/publication/330090538\\_Democratic\\_Model\\_On\\_Decision-Making\\_At\\_Deliberations\\_Of\\_Development\\_Planning](https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning).
- Mustanir, Ahmad, and Sandi Lubis. 2017. “Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning.” In *International Conference On Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG 2017)*, 163:316–19. Pekanbaru: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>.
- Mustanir, Ahmad, and M Rais Rahmat Razak. 2017. “Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan.” In *Prosiding*

*Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, 1–7. Pare Pare: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-6>.

Mustanir, Ahmad, and Muhammad Rusdi. 2019. "Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*. Medan. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>.

Mustanir, Ahmad, and Akhmad Yasin. 2018. "Community Participation in Transect on Development Planning." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik (JIAP)* 8 (2): 137–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>.

Mustanir, Ahmad, Akhmad Yasin, Irwan Irwan, and Muhammad Rusdi. 2018. "Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4 (4): 1–14. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1775>.